

PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PENGEMBANGAN KULTUR SEKOLAH

Rudolof Ngalu

Program Studi PGSD STKIP Santu Paulus Ruteng,

Jl. Ahmad Yani, No. 10 Ruteng, 86508

e-mail: ngalurudolf@gmail.com

ABSTRACT. Character Education Through Development of School Culture. This paper aims to examine character education through the development of school culture. This study is motivated by concerns about the implementation of character education that has been developed in national education over the past decade, but has not shown optimal results. One reason is because the implementation of character education runs partially and focuses on classroom learning only. In fact, the implementation of character education in schools must be comprehensive. This means that the program must be supported by activities outside the classroom which include co-curricular, extracurricular programs, and the development of school culture. Character education through the development of school culture is carried out in two approaches, namely structural approaches and cultural approaches. The structural approach is based on command and is formally obligatory. This approach is useful for structuring attitudes, behaviors, and lives of school people in the short term. While the cultural approach emphasizes the aspects of transmission and planting of cultural values through agitation, motivation, habituation, and example which in the long run will be able to move change in a steady manner. The implementation of school culture based character education is applied using the strategies of modeling, teaching, and strengthening (reinforcing).

Keywords: Education, Character, Culture, School

ABSTRAK. Pendidikan Karakter Melalui Pengembangan Kultur Sekolah. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang pendidikan karakter melalui pengembangan kultur sekolah. Kajian ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan tentang pelaksanaan pendidikan karakter yang sudah dikembangkan dalam pendidikan nasional selama satu dekade terakhir ini, tetapi belum menunjukkan hasil yang optimal. Salah satu hal yang ditengarai menjadi penyebabnya adalah karena implementasi pendidikan karakter yang berjalan secara parsial dan berfokus pada pembelajaran di kelas saja. Padahal, implementasi pendidikan karakter di sekolah harus bersifat komprehensif. Artinya program itu harus ditunjang oleh kegiatan di luar kelas yang meliputi program ko-kurikuler, ekstrakurikuler, dan pengembangan kultur sekolah. Pendidikan karakter melalui pengembangan kultur sekolah dijalankan dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan kultural. Pendekatan struktural bercorak dasar komando dan bersifat mewajibkan secara formal. Pendekatan ini berguna untuk menata atau menstrukturisasi sikap, perilaku, dan kehidupan warga sekolah dalam jangka pendek. Sementara pendekatan kultural menekankan pada aspek transmisi dan penanaman nilai-nilai kultural melalui agitasi, motivasi, pembiasaan/habituasi, dan peneladanan yang dalam jangka panjang akan mampu menggerakkan perubahan secara mantap. Pelaksanaan pendidikan karakter berbasis kultur sekolah ini diterapkan dengan menggunakan strategi pemodelan (*modeling*), pengajaran (*teaching*), dan penguatan lingkungan (*reinforcing*).

Kata Kunci: Pendidikan, Karakter, Kultur, Sekolah

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan yang ingin dicapai bangsa Indonesia sebagaimana digagas *founding fathers* adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tersurat jelas dalam alinea ke-4 Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia sejak awal menyadari bahwa pendidikan merupakan penanaman modal manusia (*human capital investment*) yang amat dibutuhkan dalam pembangunan sebuah bangsa (Todaro dan Smith, 2006: 269). Pendidikan yang berkualitas menjadi investasi strategis untuk

kemudian melahirkan sumber daya manusia yang andal sebagai agen pembangunan dan perubahan bangsa ke arah yang lebih baik.

Cita-cita konstitusional tentang pembangunan pendidikan kini menghadapi tantangan serius. Tantangan-tantangan kian kompleks seiring perguliran waktu dan perubahan zaman. Tantangan itu bersumber sekaligus dari konteks kehidupan aktual pada tataran global, nasional, dan lokal. Pada konteks global, pendidikan ditantang oleh globalisasi yang berlangsung amat massif,

akseleratif, dan eksefif (Giddens, 2003: vii). Globalisasi dengan motor utamanya, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu menantang dalam kehadirannya yang berwajah ganda. Di satu sisi, kemajuan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, keterbukaan informasi dan kemudahan komunikasi memang diakui menjanjikan banyak jalan menuju kemajuan. Akan tetapi, di sisi lain, globalisasi yang mensyaratkan keterbukaan total, peleburan batas antarbangsa, juga membuat penetrasi dan asimilasi budaya menjadi pengalaman tak terhindarkan. Di titik inilah, globalisasi memberi ruang bagi kebudayaan dan ideologi negatif seperti kapitalisme, konsumerisme, hedonisme, individualisme, dan lain-lain untuk merangsek masuk, mengancam tatanan nilai nasional dan lokal serentak merongrong kemandirian serta jati diri bangsa.

Pada konteks nasional, bangsa Indonesia terus berkuat dengan persoalan seputar kemerosotan moral dan karakter bangsa. Dekadensi moral dan karakter bangsa ini muncul ke permukaan dalam aneka wajah seperti mewabahnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di semua lini kehidupan, maraknya aksi kekerasan, meluasnya aksi perusakan lingkungan, munculnya sikap-sikap intoleran antarkelompok yang berbeda identitas, dan lain sebagainya (Oetama, 2012 dalam Sutjipto, 2012: 81). Ketika aksi-aksi tak bermoral tersebut justru dilakoni oleh mereka yang berkualifikasi pendidikan tinggi, maka pendidikan adalah salah satu aspek pembangunan yang pantas digugat dan dimintai pertanggungjawabannya.

Pada konteks lokal, dalam dunia pendidikan itu sendiri, rupa-rupa persoalan pun hadir ke permukaan. Kekerasan atau tawuran antarpelajar adalah satu contoh dari beberapa permasalahan lama yang masih terus saja mengemuka. Praktik kekerasan guru terhadap siswa atau pun sebaliknya siswa terhadap guru menjadi hal kian jamak terjadi. Narasi buruk tentang praktik kecurangan di sekolah, seperti kebiasaan mencontek, pelanggaran hak cipta (plagiarisme), kekerasan dalam penerimaan siswa baru, perundungan, pelecehan seksual, perilaku tak disiplin, dan sebagainya, juga masih menjadi catatan buram untuk dunia pendidikan tanah air.

Pemerintah Indonesia telah berusaha memformulasikan kembali konsep pendidikan nasional dengan mencanangkan pembangunan

dan pendidikan karakter bangsa demi merespons tantangan-tantangan yang ada. Secara lebih luas dan implisit, ikhtiar itu ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005—2025 (Daryanto dan Darmiatun, 2013: 42). Secara teknis, gagasan pendidikan karakter selanjutnya diuraikan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dengan menyusun Desain Induk Pendidikan Karakter (Kemendiknas, 2010: 14).

Secara umum, desain pendidikan karakter dilaksanakan dalam dua konteks, yaitu konteks makro dan konteks mikro (Kemendiknas, 2010: 6). Secara makro, implementasi pendidikan karakter melibatkan seluruh elemen masyarakat. Sementara untuk konteks mikro, implementasi pendidikan karakter berpusat pada satuan pendidikan atau sekolah. Gagasan dan tujuan dalam program pendidikan karakter sejatinya amat mulia dan cemerlang. Alur berpikirnya pun sejalan dengan hakikat terdalam pendidikan sebagai usaha untuk memberdayakan segenap potensi dalam diri manusia. Namun fakta yang terjadi di lapangan (*das Sein*) sering bertolak belakang dengan idealisme yang diusung (*das Sollen*). Sejauh ini pendidikan karakter dinilai belum optimal dan berhasil seperti yang diharapkan.

Khusus untuk konteks mikro di sekolah, beberapa kendala yang ditengarai membuat implementasi pendidikan karakter tidak berjalan baik adalah: (1) nilai-nilai karakter yang dikembangkan di sekolah belum terjabarkan dalam indikator yang representatif, (2) sekolah belum dapat memilih nilai-nilai karakter prioritas yang sesuai dengan visinya dan konteks kehidupan lokal yang aktual, (3) pemahaman guru tentang konsep pendidikan karakter masih belum baik dan menyeluruh, dan (4) guru dan seluruh komponen sekolah belum dapat menjadi teladan dalam penghayatan nilai-nilai karakter yang dipilihnya (Handoyo, 2012).

Bila dicermati secara mendalam, kendala-kendala tersebut adalah implikasi dari penerapan konsep pendidikan karakter yang hanya berfokus pada proses pembelajaran di kelas. Padahal, implementasi pendidikan karakter di sekolah harus bersifat komprehensif. Artinya program itu harus ditunjang oleh kegiatan di luar kelas yang meliputi program ko-kurikuler, ekstrakurikuler, dan pengembangan budaya

sekolah. Pendidikan karakter berbasis kelas juga seringkali menghadirkan penghayatan perilaku berkarakter pada peserta didik yang bersifat heteronom. Maksudnya, motivasi yang membuat peserta didik untuk taat, berdisiplin atau berperilaku baik adalah semata-mata karena takut dihukum. Keadaan semakin keruh karena masih banyak pendidik/guru dewasa ini yang belum mampu menjadi *role model* bagi peserta didiknya. Singkatnya, implementasi pendidikan karakter di sekolah belum efektif karena belum sungguh menjadi bagian dari kehidupan dan kultur sekolah secara keseluruhan (Deal dan Peterson, 2009: 231). Pendidikan karakter hanya sebatas pengajaran-pengajaran verbal dan instruksi atau regulasi struktural. Dimensi kultural berupa habituasi dan pemodelan masih kurang diperhatikan. Alhasil, nilai-nilai karakter dirasakan masih seperti “nilai-nilai impor” yang belum menjadi milik semua warga sekolah.

Artikel ini merupakan hasil telaah pustaka yang menganalisis pendidikan karakter melalui pengembangan kultur sekolah. Berdasarkan kajian pustaka dan analisis penulis, diyakini bahwa pendidikan karakter akan menjadi proses yang lebih efektif apabila ia menjadi bagian dari seluruh kehidupan peserta didik di sekolah, baik di dalam kelas, maupun di luar kelas. Pendidikan karakter harus terintegrasi dalam kultur sekolah yang disistematisasi baik dalam kebijakan struktural maupun dalam habituasi secara kultural. Pendidikan karakter tidak boleh berhenti pada proses pembelajaran di kelas yang cenderung instruksional-verbalistik dan menekankan aspek administratif. Pendidikan karakter harus berlanjut dalam dinamika kehidupan di luar kelas agar penghayatan nilai karakter lebih hidup dan otentik.

PENDIDIKAN KARAKTER

Pendidikan karakter modern sejatinya dicetuskan pertama kali oleh seorang pedagog Jerman, F.W. Foerster (1869—1966) (Muslich, 2011: 37). Lahirnya pendidikan karakter merupakan upaya revitalisasi pedagogi ideal-spiritual yang sempat hilang tergerus arus positivisme yang dipelopori oleh filsuf dan sosiolog Perancis Auguste Comte (1798—1857). Tujuan pendidikan menurut Foerster adalah untuk pembentukan karakter yang terwujud dalam kesatuan esensial antara si subjek dengan perilaku dan sikap hidup yang dimilikinya. Karakter menjadi semacam

identitas yang mengatasi pengalaman kontingen yang selalu berubah. Dari kematangan karakter inilah kualitas seorang pribadi diukur (Koesoema, 2010: 41).

Kekuatan karakter seseorang tampak dalam empat ciri fundamental yang mesti dimiliki. Kematangan keempat ciri fundamental karakter inilah yang memungkinkan manusia melewati tahap individualitas menuju personalitas (Foerster, 1960 dalam Koesoema, 2010: 42). **Pertama, *keteraturan interior*** melalui mana setiap tindakan diukur berdasarkan hierarki nilai. Karakter terbentuk melalui sebuah kesediaan dan keterbukaan untuk mengubah dari ketidakteraturan menuju keteraturan nilai. **Kedua, *koherensi*** yang memberikan keberanian melalui mana seseorang dapat mengakarkan diri teguh pada prinsip, tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau takut risiko. Koherensi merupakan dasar yang membangun rasa percaya satu sama lain. Kredibilitas seseorang akan runtuh apabila tidak ada koherensi. **Ketiga, *otonomi*** atau kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan aturan dari luar sehingga menjadi nilai-nilai bagi pribadi. Hal ini tampak dari penilaian keputusan pribadi tanpa terpengaruh atau desakan dari pihak lain. **Keempat, *keteguhan dan kesetiaan***. Keteguhan merupakan daya tahan seseorang untuk mengingini apa yang dipandang baik. sementara kesetiaan merupakan dasar bagi penghormatan atas komitmen yang dipilih.

Setelah Foerster, banyak pihak kemudian berusaha merumuskan pengertian pendidikan karakter. Elkind dan Sweet (1999) (dalam Kemendiknas, 2010: 13), misalnya, menyatakan bahwa pendidikan karakter dimaknai sebagai “... *the deliberate effort to help people understand, care about, and act upon core ethical values*”. Pendidikan karakter adalah suatu usaha sengaja untuk membantu orang memahami, peduli dan bertindak menurut nilai-nilai etika.

Sementara itu menurut Ramli (2010) dalam Kemendiknas (2010: 13), pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia, warga masyarakat, dan warga negara yang baik.

Berbeda dengan Ramli, Koesoema (2010: 198) melihat pendidikan moral dan pendidikan karakter tidaklah identik.

Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan lingkungan yang membantu individu dalam mengambil keputusan. Dalam pendidikan moral, ruang lingkungannya adalah kondisi batin seseorang. Sedangkan dalam pendidikan karakter ruang lingkungannya selain terdapat dalam diri individu, juga memiliki konsekuensi sosial. Menurut Koesoema (2010: 190-193), pendidikan karakter adalah keseluruhan dinamika relasional antarpribadi dengan berbagai macam dimensi, baik dari dalam maupun dari luar dirinya, agar pribadi itu semakin dapat menghayati kebebasannya sehingga ia dapat semakin bertanggung jawab atas pertumbuhan dirinya sendiri sebagai pribadi dan perkembangan orang lain dalam hidup mereka. Pendidikan karakter memiliki dua dimensi sekaligus, yakni dimensi individual dan dimensi sosio-struktural (Nucci, 2008: 14). Dimensi individual berkaitan erat dengan pendidikan nilai dan pendidikan moral seseorang. Sedangkan dimensi sosio-kultural lebih melihat bagaimana menciptakan sebuah sistem sosial yang kondusif bagi pertumbuhan individu.

Menurut Lickona (1992: 53), pendidikan karakter yang baik harus melibatkan bukan saja aspek “knowing the good” (*moral knowing*), tetapi juga “desiring the good” atau “loving the good” (*moral feeling*) dan “acting the good” (*moral action*). Hal ini diperlukan agar manusia mampu memahami, merasakan, dan sekaligus mengerjakan nilai-nilai kebajikan.

Ketiga komponen karakter itu kemudian dielaborasi Lickona (1992: 54-55) dalam beberapa poin sebagai berikut: *pertama, moral knowing*. Terdapat enam hal yang menjadi tujuan dari diajarkannya *moral knowing* yaitu 1) kesadaran moral (*moral awareness*), 2) mengetahui nilai moral (*knowing moral values*), 3) *perspective talking*, 4) penalaran moral (*moral reasoning*), 5) membuat keputusan (*decision making*), 6) pengetahuan diri (*self knowledge*). *Kedua, moral feeling*. Terdapat enam hal yang merupakan aspek dari *Moral feeling*/ emosi yang harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia berkarakter, yakni: 1) nurani (*conscience*), 2) penghargaan diri (*self esteem*), 3) empati (*empathy*), 4) cinta kebaikan (*loving the good*), 5) kontrol diri (*self control*), dan kerendahan hati (*humility*). *Ketiga, moral action* perbuatan atau tindakan moral ini merupakan *out come* dari dua

komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang untuk berbuat (*act morally*) maka harus dilihat dari karakter yaitu kompetensi (*competence*), keinginan (*will*), dan kebiasaan (*habit*).

Beberapa pengertian pendidikan karakter tersebut menyajikan konteks atau *locus* pendidikan karakter yang luas dan umum. Pada dasarnya pendidikan karakter memang bisa dilakukan di mana saja, mulai dari keluarga, lingkungan pergaulan, lingkungan kerja, dan masyarakat atau bangsa pada umumnya (Mulyasa, 2013: 4). Untuk konteks khusus sekolah, pendidikan karakter juga dikembangkan dengan pengertian lebih spesifik dan teknis. Koesoema (2012: 57), misalnya, mengutip pengertian pendidikan karakter dari *Character Education Partnership* (CEP), sebuah program nasional pendidikan karakter di Amerika Serikat, yang menyatakan demikian.

“Sebuah gerakan nasional untuk mengembangkan sekolah-sekolah agar dapat menumbuhkan dan memelihara nilai-nilai etis, tanggung jawab dan kemauan untuk merawat satu sama lain dalam diri anak-anak muda, melalui keteladanan dan pengajaran tentang karakter yang baik, dengan cara memberikan penekanan pada nilai-nilai universal yang diterima oleh semua. Gerakan ini merupakan usaha-usaha dari sekolah, distrik, dan Negara bagian yang sifatnya intensional dan proaktif untuk menanamkan dalam diri para siswa nilai-nilai moral inti, seperti perhatian dan perawatan (*caring*), kejujuran, keadilan (*fairness*), tanggung jawab dan rasa hormat terhadap diri dan orang lain.”

Sebagaimana di Amerika, pendidikan karakter di sekolah juga mulai dikembangkan di tanah air dalam kurang lebih satu dekade terakhir ini. Paradigma lama tentang pendidikan sebagai proses transfer ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) telah mulai digeser menjadi upaya sistematis dan komprehensif untuk mengubah perilaku dan membentuk karakter yang unggul. Untuk itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional mencanangkan pendidikan karakter di sekolah sebagai:

“...pendidikan yang mengembangkan nilai dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya,

sebagai anggota masyarakat, dan warganegara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif (Kemendiknas, 2010: 4).”

Dengan demikian, pendidikan karakter di sekolah merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.

KULTUR SEKOLAH

Pertanian Kultur Sekolah

Kultur sekolah didefinisikan sebagai serangkaian nilai, norma, aturan moral, keyakinan, dan kebiasaan, yang telah membentuk perilaku dan hubungan-hubungan yang terjadi di dalam sekolah yang menjadi pengikat kuat kebersamaan sebagai warga satu komunitas pendidikan (Deal dan Peterson, 2009: 8). Kultur sekolah ini biasanya diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya sekolah atau kultur juga dipahami sebagai keyakinan, kebijakan, norma, dan kebiasaan di dalam sekolah yang dapat dibentuk, diperkuat, dan dipelihara melalui pimpinan, guru-guru, pegawai, dan seluruh komponen di sekolah (Short dan Greer 2000, dalam Deal dan Peterson, 2009: 15). Senada dengan itu, Zamroni (2009: 40), melihat kultur sekolah sebagai sebuah entitas dalam sekolah yang menggambarkan pemikiran-pemikiran bersama (*shared ideas*), asumsi-asumsi (*assumptions*), nilai-nilai (*values*), dan keyakinan (*belief*) yang dapat memberikan identitas (*identity*) sekolah yang menjadi standar perilaku yang diharapkan.

Sealir dengan pemikiran beberapa pakar tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional (2010: 19) menyatakan, kultur sekolah sebagai

“...suasana kehidupan sekolah dimana peserta didik berinteraksi dengan sesamanya, guru dengan guru, konselor dengan peserta didik, antar tenaga kependidikan, antara tenaga kependidikan dengan pendidik dan peserta didik, dan antar anggota kelompok masyarakat dengan warga sekolah.”

Dari sejumlah pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kultur sekolah adalah suasana kehidupan seluruh komponen sekolah

yang mencerminkan ide, nilai, dan keyakinan bersama. Suasana kehidupan itu membentuk identitas sekolah secara khas dan ajeg. Suasana kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi itu juga menjadi patokan dalam menjalankan seluruh aktivitas pendidikan di sekolah dari waktu ke waktu.

Elemen-elemen Kultur Sekolah

Kultur sekolah pada dasarnya terdiri atas dua elemen. *Elemen pertama* terdiri bagian dapat diamati dan bagian yang tidak dapat diamati. Bagian yang bisa diamati antara lain desain arsitektur gedung, tata ruang, desain eksterior dan interior sekolah, kebiasaan, peraturan-peraturan, ritual, simbol-simbol, slogan, gambar-gambar yang dipasang, sopan santun, dan sebagainya. Sementara bagian kedua berada di balik bagian pertama dan relatif tidak dapat diamati, tidak kelihatan, dan tidak dapat dimaknai dengan segera. Elemen pertama ini berintikan norma perilaku bersama warga organisasi yang berupa norma-norma kelompok, cara-cara tradisional berperilaku yang telah lama dimiliki suatu kelompok masyarakat (termasuk sekolah). Norma-norma perilaku ini sulit diubah, yang biasa disebut sebagai artefak. *Elemen kedua* merupakan nilai-nilai bersama yang dianut kelompok berhubungan dengan apa yang penting, yang baik, dan yang benar (Kotter 1996: 167-178). Elemen kedua ini semuanya tak dapat diamati karena terletak dalam kehidupan bersama. Kultur pada elemen kedua ini sangat sulit atau bahkan sangat kecil kemungkinannya untuk diubah. Kalau pun berubah, prosesnya memerlukan waktu yang lama.

Hampir sependapat dengan Kotter, Stolph dan Smith (1995: 120-122) menyatakan bahwa kultur sekolah memiliki tiga bagian yaitu: (1) artifak di permukaan, (2) nilai-nilai dan keyakinan di tengah, dan (3) asumsi yang berada di lapisan dasar. Artifak adalah bagian kultur sekolah yang paling mudah diamati, seperti aneka ritual sehari-hari di sekolah, berbagai upacara, benda-benda simbolik di sekolah, dan aneka ragam kebiasaan yang berlangsung di sekolah. Bagian yang lebih dalam berupa nilai-nilai dan keyakinan yang ada di sekolah. Sebagian berupa norma-norma perilaku yang diinginkan sekolah. Sementara bagian yang paling dalam adalah asumsi-asumsi yaitu simbol-simbol, nilai-nilai dan keyakinan yang tak dapat dikenali tetapi

berdampak nyata pada perilaku warga sekolah.

Secara lebih teknis, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Umum (Dit PSMU, 2002: 24) menguraikan beberapa aspek kultur sekolah yang meliputi: (1) aspek kultur sosial yaitu interaksi antarwarga sekolah, (2) aspek kultur akademik, (3) aspek kultur mutu, dan (4) aspek artifak.

Aspek kultur sosial (interaksi warga) meliputi budaya memaafkan, menolong, memberi penghargaan, menegur, mengunjungi, memberi selamat, saling menghormati, dan mengucapkan salam dalam interaksi sosial dengan sesama warga sekolah atau orang lain. *Aspek budaya akademik* meliputi proses monitoring kemajuan belajar, budaya literasi, bimbingan belajar, kebiasaan bertanya atau keberanian mengemukakan pendapat, persaingan meraih prestasi, kepemilikan buku pelajaran, penugasan oleh guru, umpan balik dari guru, strategi belajar mengajar, penguasaan bahan dari guru, ketepatan media pembelajaran yang digunakan. *Aspek budaya mutu* meliputi perhatian khusus terhadap budaya utama sekolah yang meliputi (1) budaya jujur, (2) saling percaya, (3) kerjasama, (4) kegembiraan membaca, (5) disiplin, (6) bersih, (7) berprestasi, (8) penghargaan, dan (9) efisiensi. *Aspek artifak* meliputi artifak fisik seperti arsitektur bangunan, gambar dan *pamphlet motivasional* yang ada di sekolah dan artifak perilaku warga sekolah.

Fungsi Kultur Sekolah

Kultur sekolah sekurang-kurangnya memiliki empat fungsi penting, yaitu (Daryanto dan Darmiatun, 2013: 20-21): *Pertama*, kultur sekolah meningkatkan perhatian dan perilaku sehari-hari warga sekolah terhadap apa yang penting dan bernilai bagi sekolah. Atensi itu terutama ditujukan pada semua kegiatan yang menjadi program prioritas sekolah. Misalnya, apabila fokus prioritas sekolah bertautan dengan prestasi akademik siswa, maka seluruh warga sekolah akan dikondisikan untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas program itu. Demikian juga ketika sekolah menempatkan pembentukan karakter sebagai titik prioritas, maka semua kegiatan pendukung seperti pengajaran (*teaching*), pemodelan (*modeling*), dan penguatan

lingkungan (*reinforcing*) akan tertuju pada titik tersebut.

Kedua, kultur sekolah membangun komitmen seluruh warga sekolah untuk melakukan identifikasi diri dengan nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan tertentu di sekolah. Dengan adanya kultur sekolah, semua warga sekolah diharapkan bisa memiliki komitmen dan mengidentifikasikan dirinya dengan nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan yang ada dalam sekolah tersebut. Seluruh cara pandang dan perilaku sedapat mungkin disesuaikan atau diidentifikasi menurut panduan kultur sekolah.

Ketiga, kultur sekolah juga memperkuat dan memperjelas motivasi dalam diri setiap warga sekolah. Dengan adanya sistem nilai, norma, kebiasaan yang telah ajeg, setiap warga sekolah akan memiliki dorongan dan orientasi yang jelas dalam seluruh keberadaannya di sekolah.

Keempat, kultur sekolah akan memertinggi tingkat efektivitas dan produktivitas. Seluruh warga sekolah akan terbiasa untuk bekerja keras dan memiliki komitmen tinggi dalam pencapaian yang baik. Selain itu kultur sekolah yang baik juga memperkuat proses pemecahan masalah secara kolaboratif dan pengambilan keputusan yang demokratis serta terencana.

Pengembangan Kultur Sekolah

Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Umum (2002: 18), proses pengembangan kultur sekolah dapat dilakukan melalui tiga tataran yaitu (1) pengembangan pada tataran spirit dan nilai-nilai, (2) pengembangan pada tataran teknis, dan (3) pengembangan pada tataran sosial. *Tataran pertama*, proses pengembangan kultur sekolah dapat dimulai dengan pengembangan pada level spirit dan nilai-nilai, yaitu dengan cara mengidentifikasi berbagai spirit dan nilai-nilai. Kultur sekolah bersumber dari spirit dan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah. Tidak ada pengembangan kultur sekolah yang sistematis tanpa identifikasi berbagai spirit dan nilai-nilai yang dapat dijadikan landasan.

Dalam kaitan dengan pendidikan karakter, langkah pertama yang perlu dilakukan dalam pengembangan kultur sekolah adalah dengan mengidentifikasi, memilih atau menentukan nilai-nilai karakter prioritas yang menjadi dasar pembentukan kultur sekolah sekaligus yang ingin ditanamkan kepada para

peserta didik. Nilai-nilai yang dipilih itu secara epistemologis harus didukung oleh argumentasi atau asumsi logis-filosofis sebagai alasan pemilihannya. Rasionalisasi ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga atas preferensinya pada nilai-nilai tertentu (Jacobs dan Spencer, 2001: 52).

Nilai-nilai tersebut kemudian harus dirumuskan secara formal dalam bentuk dokumen tertulis. Nilai-nilai itulah yang menjadi nilai-nilai inti (*core values*) dan memberi identitas bagi sekolah. Sumber yang dijadikan acuan proses identifikasi atau preferensi nilai ini adalah spirit, prinsip atau cita-cita pendiri, visi misi dan tujuan sekolah, kearifan budaya lokal, dan situasi serta tuntutan dunia yang sedang aktual.

Pertama, sekolah perlu menelusuri kembali catatan sejarah tentang cita-cita awal pendirinya. Filosofi dan idealisme yang melatari pendirian sekolah perlu digali kembali. Di dalamnya pasti ada nilai-nilai yang diinginkan menjadi *trade mark* sekolah.

Kedua, sekolah juga perlu menelaah kembali rumusan visi misi dan tujuan sekolah. Visi, misi, dan tujuan sekolah menduduki posisi penting karena sesungguhnya di sanalah arah masa depan sekolah digariskan. Visi, misi, dan tujuan sekolah merupakan sumber inspirasi, motivasi, dan energi bagi seluruh elemen sekolah dalam proses pendidikan.

Ketiga, di samping idealisme pendiri, visi, misi, dan tujuan sekolah, budaya lokal juga menjadi referensi penting untuk menggali nilai-nilai karakter. Bagaimanapun juga, budaya lokal pasti menyimpan kasanah nilai-nilai kehidupan yang amat kaya. Sebagai institusi pendidikan yang lahir dan hidup dalam konteks lokal, sekolah tidak bisa menutup diri dari kearifan lokal yang ada di sekitarnya (Bastian, 2002: 23). Namun demikian, adopsi nilai-nilai yang bersumber pada kearifan lokal mesti tetap dilakukan secara selektif dan kritis. Dengan begitu, sekolah tidak saja mengakomodasi, tetapi juga melakukan transformasi budaya secara konstruktif.

Keempat, agar nilai-nilai yang bersumber pada cita-cita pendiri, visi-misi sekolah, dan kearifan budaya lokal tidak kehilangan relevansi aktualnya, sekolah perlu mengkorespondensikan semuanya dengan situasi dan kondisi dunia yang aktual (Bastian, 2002: 28). Dengan itu, sekolah bisa benar-benar menjadi selaras zaman karena nilai-nilai

yang dianutnya tetap relevan dan kontekstual dengan perkembangan dunia.

Tatatan kedua proses pengembangan kultur sekolah adalah pengembangan tataran teknis. Pengembangan pada tataran ini dilakukan dengan cara mengembangkan berbagai prosedur kerja manajemen, sarana manajemen, kebiasaan kerja berbasis sekolah yang betul-betul merefleksikan spirit dan nilai-nilai yang akan dibudayakan di sekolah. Semua kebijakan, aturan atau tata tertib sekolah, pembagian kerja dan program sekolah harus dijiwai oleh nilai-nilai yang menjadi esensi kultur sekolah. Di sini dimensi komando struktural berperan penting dalam pengembangan kultur sekolah.

Tataran ketiga, proses pengembangan kultur sekolah adalah pengembangan tataran sosial. Pengembangan tataran sosial dalam konteks pengembangan kultur sekolah adalah proses implementasi dan institusionalisasi. Pengembangan kultur sekolah tidak akan cukup sekedar melalui teridentifikasinya spirit dan nilai-nilai, juga tidak cukup hanya dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan atau aturan teknis oleh pimpinan sekolah. Lebih jauh dari itu, seluruh kebijakan dan aturan teknis yang dikembangkan berdasarkan spirit dan nilai-nilai tertentu disosialisasikan dan diamalkan serta diinstitutionnaisasikan secara kontinyu sehingga menjadi suatu kebiasaan di sekolah dan di luar sekolah. Di sini ada upaya internalisasi nilai-nilai kultur sekolah dalam seluruh gerak kehidupan atau aktivitas harian sekolah. Aspek pembiasaan atau pembudayaan pada tataran ini mendapat penekanan utama.

PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PENGEMBANGAN KULTUR SEKOLAH

Momen dan Pendekatan

Dalam konteks pendidikan, kultur sekolah merupakan sebuah pola perilaku dan cara bertindak yang telah terbentuk secara otomatis menjadi bagian yang hidup dalam sebuah komunitas pendidikan. Dasar pola perilaku dan cara bertindak tersebut adalah norma sosial, peraturan sekolah, dan kebijakan pendidikan di tingkat lokal. Oleh karena itu, kultur sekolah dapat dikatakan seperti kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) yang secara efektif diharapkan memengaruhi pola perilaku dan cara berpikir seluruh anggota komunitas sekolah. Pengembangan kultur sekolah amat relevan dengan pendidikan karakter. Berkowitz dan Bear (2005: 7) secara

gambang menyatakan bahwa pendidikan karakter yang sesungguhnya adalah penciptaan lingkungan (fisik, sosial, dan budaya) sekolah yang sungguh membantu perkembangan karakter peserta didik dalam terang nilai-nilai universal. Kultur sekolah berjiwa pendidikan karakter terbentuk ketika dalam merancang sebuah program, setiap individu dapat bekerja sama satu sama lain melaksanakan visi dan misi sekolah melalui berbagai macam kegiatan (Koesoema, 2010).

Dalam mengembangkan pendidikan karakter berbasis kultur sekolah, berbagai macam momen dalam dunia pendidikan dapat menjadi *locus* dan *tempusnya*. Momen pendidikan ini dapat bersifat struktural, polisional, dan eventual (Koesoema, 2010: 145). Momen pendidikan yang bersifat struktural adalah peristiwa yang berkaitan erat dengan proses regulasi dan administrasi sekolah. Momen struktural ini di antaranya adalah proses pembentukan kesepakatan kerja, peraturan yayasan, peraturan sekolah, *job description* setiap jabatan dan kedudukan. Semua hal teknis-struktural ini harus sungguh dijiwai oleh spirit dan nilai-nilai prioritas yang melandasi kultur sekolah. Peraturan, pembagian dan pelaksanaan tugas misalnya mesti selalu berorientasi pada penghayatan serta pelestarian nilai-nilai prioritas sekolah.

Momen pendidikan yang bersifat polisional adalah kebijakan pendidikan yang dilaksanakan secara bersifat rutin dan tradisional. Kebijakan yang bersifat rutin adalah berbagai keputusan dan tindakan yang diambil dalam kerangka pengembangan mutu sekolah. Misalnya, kebijakan tentang penerimaan siswa baru, ujian sekolah, pengaturan jadwal pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, perwalian dan pengembangan profesional guru. Sementara yang bersifat tradisional adalah kebijakan rutin dalam rangka pengembangan pendidikan yang senantiasa berulang setiap tahun, seperti rapat-rapat kerja, pertemuan orang tua murid, penerimaan rapor, dll.

Momen pendidikan yang bersifat eventual adalah peristiwa-peristiwa pendidikan yang terjadi secara khas dan muncul karena terjadinya peristiwa tertentu yang merupakan tanggapan nyata sekolah atas peristiwa di luar lembaga pendidikan, dan memengaruhi kinerja lembaga pendidikan. Momen pendidikan eventual ini tidak dapat diprediksi, namun membutuhkan keputusan dan tanggapan

langsung dari pihak sekolah untuk menyikapinya.

Sealir dengan pemikiran Koesoema (2010), Sarason (1982: 28), dalam bukunya *The Culture of The School and The Problem of Change*, menyatakan bahwa pendidikan karakter berbasis kultur sekolah dapat dikembangkan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan struktural dan pendekatan kultural. Pendekatan struktural dalam pendidikan karakter berbasis kultur sekolah berkaitan dengan cara bagaimana sekolah berusaha melembagakan nilai-nilai prioritas melalui pembuatan kebijakan, instruksi, regulasi, atau penataan administrasi. Corak dasar pendekatan ini adalah komando atau *top-down*. Pendekatan ini adalah bagian dari penanaman nilai melalui perangkat-perangkat struktural yang mengikat. Dalam pendekatan struktural, ada penataan atau strukturisasi sikap, perilaku, dan kehidupan warga sekolah melalui perangkat sistem yang bersifat memaksa atau mewajibkan secara formal. Dengan itu, ada jaminan secara formal-prosedural bagi semua elemen sekolah untuk melaksanakan nilai-nilai. Perangkat sistem itu antara lain terwujud dalam kebijakan atau program sekolah, regulasi atau tata tertib sekolah dan pembagian tugas bagi segenap warga sekolah.

Sementara pendekatan kultural menekankan pada aspek transmisi dan penanaman nilai-nilai kultural melalui agitasi, motivasi, pembiasaan/habituasi, dan peneladanan/*modeling*. Corak utama pendekatan ini adalah proses belajar yang berujung pada penanaman atau penumbuhan kesadaran dalam diri setiap komponen sekolah akan nilai-nilai kultur sekolah.

Berkaitan dengan itu, Kotter (1996: 98-99) menegaskan bahwa pendekakatan struktural melalui seperangkat peraturan dan komando-komando formal hanya akan mampu mestrukturisasi perilaku dalam jangka pendek. Intervensi yang lebih tepat untuk membangun kultur sekolah yang baik adalah melalui pendekatan kultural yang dalam jangka panjang akan mampu menggerakkan perubahan secara mantap. Pengembangan model kultural ini lebih menekankan pada perubahan *mindset*, motivasi dan perilaku budaya seluruh warga sekolah.

Bagaimana pun juga, kedua pendekatan ini sejatinya sama pentingnya. Keduanya bersifat integral dan komplementer.

Pendekatan struktural berguna untuk menciptakan keteraturan pragmatis *hic et nun*. Pendekatan kultural bermanfaat secara jangka panjang sebagai investasi untuk memantapkan nilai hingga masa depan. Untuk itu, keduanya sedapat mungkin dijalankan secara simultan, saling melengkapi, dan berkelanjutan.

Implementasi dan Strategi

Proses yang efektif untuk membangun budaya sekolah adalah dengan melibatkan dan mengajak semua pihak atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama memberikan komitmennya. Untuk itu, pimpinan sekolah, para guru, dan karyawan, harus fokus pada usaha pengorganisasian yang mengarah pada komitmen tersebut dengan cara sebagai berikut (Daryanto dan Darmiatun, 2013: 27).

- 1) Mendefinisikan peran yang harus dimainkan oleh semua komponen sekolah agar dapat memberikan layanan terbaik terhadap harapan dan kebutuhan komunitas sekolah tertentu (siswa).
- 2) Menyusun mekanisme komunikasi yang efektif antara seluruh komponen baik secara internal maupun eksternal melalui pertemuan berkala.
- 3) Melakukan kajian bersama untuk mencapai keberhasilan sekolah, misalnya melalui pertemuan dengan sekolah-sekolah tertentu yang telah berhasil atau sekolah unggulan, atau dengan melakukan studi banding.
- 4) Melakukan visualisasi visi dan misi sekolah, keyakinan, nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang diharapkan sekolah.
- 5) Memberikan pelatihan-pelatihan atau memberikan kesempatan kepada semua komponen sekolah untuk mengikuti berbagai pelatihan atau pengembangan diri, yang mendukung terwujudnya budaya sekolah yang diharapkan.

Program pelaksanaan pendidikan karakter berbasis kultur sekolah ini diorganisasikan dan diterapkan di lingkungan sekolah dengan menggunakan tiga strategi utama, yakni: pemodelan (*modeling*), pengajaran (*teaching*), dan penguatan lingkungan (*reinforcing*).

Pemodelan (Modeling)

Pihak sekolah harus menyadari bahwa penanaman nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang membentuk karakter siswa bila bersumber dari contoh nyata sikap dan hidup semua elemen sekolah,

terutama kepala sekolah, guru dan pegawai. Kepala sekolah, guru, dan pegawai harus menata tutur kata, sikap, dan pola relasi sesuai dengan nilai-nilai yang melandasi kultur sekolah. Dengan itu, sikap dan pola relasi itu akan menjadi model atau teladan yang bisa diikuti oleh para siswa.

Pengajaran (Teaching)

Pihak sekolah harus memberikan perhatian yang serius terhadap pentingnya pembelajaran nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan karakter bagi para siswa. Semua kegiatan harus diorganisasikan secara tepat sesuai dengan karakter yang sedang dibudayakan. Kurikulum yang diterapkan di sekolah dalam mewujudkan budaya sekolah yang berkarakter meliputi mata pelajaran, berbagai kegiatan kurikuler, dan proyek sosial. Dalam hal ini guru secara aktif mengajarkan kepada para siswa mengenai arti penting nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan karakter terpuji yang menjadi prioritas sekolah dengan cara mengintegrasikannya ke dalam setiap mata pelajaran.

Penguatan (reinforcing)

Agar pembudayaan karakter ini dapat berkembang dan berjalan dengan efektif, harus didukung dengan adanya penguatan yang konsisten. Penguatan yang konsisten ini antara lain dilakukan dengan komunikasi yang terus-menerus berkaitan dengan nilai, norma, kebiasaan-kebiasaan yang telah menjadi prioritas dengan selalu memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menerapkan nilai-nilai tersebut. Penguatan terhadap pembudayaan karakter yang baik di sekolah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Kebijakan mengenai aturan atau tata tertib sekolah adalah menjadi acuan pokok dalam pembudayaan karakter di sekolah. Penguatan yang lain dapat berupa pembiasaan-pembiasaan yang diprogramkan pihak sekolah. Penguatan pembudayaan karakter dapat juga berupa visualisasi atau pemasangan pamflet-pamflet yang bermuatan nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan karakter, majalah dinding, dan pemberian penghargaan kepada para guru, siswa, atau kelas tertentu yang memperlihatkan prestasi yang berhubungan dengan nilai-nilai karakter prioritas. Tidak kalah pentingnya untuk mendukung pembudayaan karakter yang baik

adalah penataan fisik lingkungan sekolah.

KESIMPULAN

Wacana dan praktik pendidikan karakter di Indonesia telah dijalankan secara formal-aktual selama kurang lebih satu dekade. Tantangan multidimensi yang dialami bangsa baik yang bersumber dari konteks global, nasional, maupun lokal adalah latar belakang di balik wacana dan praktik pendidikan karakter di tanah air. Pendidikan karakter tersebut telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan selanjutnya dielaborasi secara teknis dalam desain induk pendidikan karakter pada tahun 2010.

Akan tetapi, harus diakui bahwa implementasi pendidikan karakter tersebut masih jauh dari harapan dan belum optimal. Penyebab utama belum optimalnya pelaksanaan pendidikan karakter adalah pemahaman dan praktik pendidikan karakter yang bersifat parsial. Pendidikan karakter masih dipahami dan diimplementasikan secara terbatas pada konteks pembelajaran di kelas. Corak utama pendidikan karakter melalui pembelajaran di kelas ini masih administratif dan verbalistik. Pendidikan karakter di kelas belum menyentuh esensi pembentukan karakter itu sendiri yaitu perubahan tingkah laku yang bersifat holistik, behavioristik, dinamis, dan otentik. Pendidikan karakter melalui pembelajaran di kelas cenderung menitikberatkan pada aspek kognitif. Selain itu, guru sebagai aktor utama dalam kelas sering kesulitan membagi fokus antara pencapaian tujuan instruksional dan pembentukan karakter. Akibatnya pendidikan karakter menghasilkan pengetahuan minus praktik dan penghayatan nilai yang bersifat indoktrinatif serta heteronom.

Pendidikan karakter seharusnya dijalankan secara komprehensif. Pembentukan karakter tak boleh berhenti pada pengajaran verbal di kelas. Ia harus dilanjutkan dalam dinamika kehidupan yang lebih nyata di luar kelas. Pendidikan karakter harus dijalankan secara berkesinambungan melalui pengembangan kultur sekolah yang mendukung penanaman nilai dan pembentukan karakter. Pendidikan karakter yang sesungguhnya adalah penciptaan lingkungan (fisik, sosial, dan budaya) sekolah yang sungguh membantu perkembangan karakter peserta didik dalam terang nilai-nilai universal.

Kultur sekolah adalah suasana kehidupan sekolah yang didasarkan pada ide, nilai, dan keyakinan bersama. Suasana kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi itu menjadi patokan dalam menjalankan seluruh aktivitas pendidikan di sekolah dari waktu ke waktu. Kultur sekolah berfungsi untuk meningkatkan atensi, komitmen, motivasi warga sekolah, pada nilai-nilai prioritas sekolah. Tahap-tahap pengembangan kultur sekolah adalah identifikasi nilai-nilai prioritas, pemantapan dalam tatatan teknis dan pemantapan dalam tataran sosial. Dalam kaitan dengan pendidikan karakter berbasis pengembangan kultur sekolah, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan struktural dan pendekatan kultural. Pendekatan struktural bercorak dasar komando dan bersifat memaksa berguna untuk membangun ketaatan dalam jangka pendek. Sementara pendekatan structural berdimensi habituasi dan internalisasi yang bermanfaat menciptakan kesadaran secara jangka panjang. Kedua pendekatan ini harus dijalankan secara komplementer dan berkesinambungan. Secara implementatif, kedua pendekatan ini diintegrasikan dalam tiga strategi utama yakni, pengajaran, pemodelan, dan penguatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Bastian, Aulia Reza, 2002, *Reformasi Pendidikan: Langkah-Langkah Pembaharuan dan Pemberdayaan Pendidikan dalam Rangka Desentralisasi Sistem Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Berkowitz, M. W. and Melinda C. Brier, 2005. *What Works in Character Education: A Research-Driven Guide for Educators*. Whasinton DC: University of Missouri-St Louis.
- Daryanto dan Suryatri Darmiatun. 2013. *Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Deal, Terrence E. dan Kent D. Peterson. 2009. *The Shaping School Culture Filedbook*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Umum. 2002. *Pedoman Pengembangan Kultur Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Umum.

- Giddens, Anthony. 2003. *Runaway World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, Penterj. Andri Kristiwan S. dan Yustina Koen S. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Handoyo, Budi. 2012. Kendala-Kendala dalam Implementasi Pendidikan Karakter. <https://hangeo.wordpress.com/2012/03/15/kendala-kendala-implementasi-pendidikan-karakter-di-sekolah/>. Diakses tanggal 27 Februari 2019.
- Jacobs D. dan Spencer D.D. 2001. *Theacing Virtues: Building Character Across the Curriculum*. Landham: Scarecrow Press.
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. *Desain Induk Pendidikan Karakter*, Jakarta: Kemendiknas.
- , 2010, *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Pedoman Sekolah*. Jakarta: Puskur Balitbang Kemendiknas.
- Koesoema, Doni A. 2010. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo.
- , 2012. *Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kotter, John P. 1996. *Leading Change*. Boston: Harvard Business School Press.
- Lickona, T. 1992. *Educating for Character, How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. Bantam Books, New York.
- Mulyasa, H.E., 2013, *Manajemen Pendidikan Karakter*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muslich, Masnur. 2011. *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sarason, Seymour B, 1982, *The Culture of The School and The Problem of Change*. Boston: Allyn and Bacon Publishing, Inc.
- Stolp, Stephen and Smith, Stuart C. 1995, *Transforming School Culture Stories. Symbols, Values and Leader Role*. Oregon: Eugene OR: ERIC Clearing House on Educational Management. University of Oregon.
- Sutjipto (ed), 2012, *Pendidikan Nasional: Arah ke Mana*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Todaro, Michael. P. dan Stephen. C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Zamroni, 2009, *Panduan Teknis Pengembangan Kultur Sekolah* Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.